

SURYA KANTA VS BALI ADNYANA: SEGREGASI SOSIAL, KEMULTIKULTURAN, RESISTENSI WACANA DOMINAN DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT KASTA DI BALI

Made Ferry Kurniawan¹, I Gede Suwindia², Ni Nyoman Kurnia Wati³

STAHN Mpu Kuturan Singaraja^{1,2,3}

Email: kurniawanmadeferry@gmail.com¹, igedesuwindia76@gmail.com², kurnia_yasa@yahoo.com³

Abstrak

Gerakan transformatif pengkastaan, dimulai di Singaraja, pada tahun 1925. Redaksi surat kabar Surya Kanta menciptakan transfigurasi topologi sosio-politik, khususnya pengkritisan sistem kasta, praksis sosial, budaya dan agama. Dalam sudut pandang lain, resistensi Surya Kanta pada sistem kasta bertujuan untuk menghancurkan tatanan dominasi Tri Wangsa. Kekuasaan mereka (dalam rentang waktu lama), menciptakan hierarki sosial, serta ketidakseimbangan distribusi keadilan. Surya Kanta memegang otoritas untuk memulihkan keteraturan sistem sosial dan mendesak keberadaan otoritas dominan, maka transformasi sosial dari kelompok yang termarginalisasi harus dilakukan, sebagai medium untuk menyadarkan incumbent (Bali Adnyana). Riset ini memformulasikan dua rumusan masalah, yakni: a) bagaimana skema segregasi sosial dan konstruksi kemultikulturalan dalam kontestasi Surya Kanta versus Bali Adnyana? b) bagaimana skema konstruksi resistensi wacana dominan dan transformasi sosial dari Surya Kanta dalam realitas kasta di Bali? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan intertekstualitas. Intertekstualitas dioperasionalkan untuk melakukan eksplorasi pada konstruksi pewacanaan dan resistensi kasta yang dilakukan oleh Surya Kanta di Singaraja pada tahun 1925. Referensi yang memberikan penjelasan tentang pertarungan wacana, antara wacana arus utama (Bali Adnyana) dan wacana pinggiran (Surya Kanta), dikumpulkan secara periodik, melalui berbagai locus, seperti perpustakaan pribadi, artikel atau penelitian relevan dan beberapa sumber pada grey area. Aspek esensial yang ingin ditransformasi dari gerakan intelektual melalui pers Surya Kanta adalah upaya untuk mengubah stratifikasi sosial masyarakat dengan kategorisasi berdasarkan kasta. Disparitas dan distingsi tersebut menyebabkan kehidupan sosial masyarakat terklasifikasi menjadi dua ranah, yakni ranah superior (diisi oleh Tri Wangsa atau tiga kelompok kasta atas, terdiri dari Brahmana, Ksatria dan Weisya) serta ranah inferior (diisi oleh Jaba Wangsa atau kelompok masyarakat bawah, diisi oleh Sudra). Lahirnya Surya Kanta adalah bentuk antitesa atau "wacana tandingan" untuk menggugat konservatisme Bali Adnyana. Keberadaan Surya Kanta selain mengkritisi segregasi sosial (berbasiskan genealogis – kasta), secara esensial juga memiliki tujuan untuk menggugat hegemoni masyarakat Tri Wangsa yang dilegitimasi melalui upacara ngaben (upacara pembakaran jenazah dalam tradisi Hindu di Bali). Kritik Surya Kanta melalui tulisannya, memberikan eksplanasi bahwa, status sosial individu ataupun kelompok tertentu tidak ditunjukkan dari liturgi ataupun genealogi, akan tetapi dari penguasaan ilmu pengetahuan. Publikasi kritis Surya Kanta, membawa kita pada dimensi bahwa, gerakan sosial sudah mengalami transisi, tidak lagi pada ranah benturan fisik, akan tetapi secara tendensius mengarah pada benturan argumentasi ataupun kekuatan nalar.

Kata Kunci: Surya Kanta, Bali Adnyana, kemultikulturalan, kasta, Singaraja.

Abstract

The transformative caste movement began in Singaraja in 1925. The editorial board of the Surya Kanta newspaper created a transfiguration of the socio-political topology, particularly criticizing the caste system, social practices, culture, and religion. From another perspective, Surya Kanta's resistance to the caste system aims to dismantle the dominance of the Tri Wangsa order. Their power (over a long period of time) creates a social hierarchy and an imbalance in the distribution of justice. Surya Kanta holds the authority to restore the order of the social system and urge the existence of dominant authority, so social transformation of marginalized groups must be carried out as a medium to awaken the incumbent (Bali Adnyana). This research formulates two problem statements, namely: a) how the scheme of social segregation and the construction of multiculturalism in the contestation between Surya Kanta and Bali Adnyana? b) how the scheme of constructing resistance to dominant discourse and social transformation from Surya Kanta in the caste reality in Bali? This research uses qualitative methods with an intertextuality approach. Intertextuality is operationalized to explore the construction of discourse and caste resistance conducted by Surya Kanta in Singaraja in 1925. References that provide explanations about the discourse struggle, between the

mainstream discourse (Bali Adnyana) and the peripheral discourse (Surya Kanta), were collected periodically through various loci, such as personal libraries, relevant articles or research, and some sources in the grey area. The essential aspect that the intellectual movement through the Surya Kanta press aims to transform is the effort to change the social stratification of society through categorization based on caste. Those disparities and distinctions caused the social life of the community to be classified into two realms, namely the superior realm (filled by Tri Wangsa or the three upper caste groups, consisting of Brahmana, Ksatria, and Weisya) and the inferior realm (filled by Jaba Wangsa or the lower society group, filled by Sudra). The emergence of Surya Kanta is an antithesis or "counter-discourse" to challenge the conservatism of Bali Adnyana. The existence of Surya Kanta not only criticizes social segregation (based on genealogy – caste), but essentially also aims to challenge the hegemony of the Tri Wangsa society legitimized through the ngaben ceremony (the cremation ceremony in Hindu tradition in Bali). Surya Kanta's critique through his writings provides an explanation that the social status of individuals or certain groups is not indicated by liturgy or genealogy, but by the mastery of knowledge. Surya Kanta's critical publication brings us to the dimension that social movements have undergone a transition, no longer in the realm of physical clashes, but tendentiously towards clashes of argumentation or the power of reasoning.

Keywords: Surya Kanta, Bali Adnyana, multiculturalism, caste, Singaraja.

PENDAHULUAN

Tempora Mutantur et nos Mutamur Illis atau perubahan merupakan keniscayaan, dan individu serta masyarakat berada dalam arus perubahan tersebut. Adagium berbahasa Latin itu, berkelindan dengan konsepsi filosofis yang dikemukakan oleh filsuf Yunani Klasik, Heraclitos. Heraclitos menyatakan bahwa, gerak masyarakat dan fenomena sosial “selalu mengalir”– yang ia istilahkan dengan *panta rhei kai uden menei* atau segala sesuatu tidak tinggal tetap. Dari dua istilah tersebut, kita bisa melihat bahwa, konteks sosial selalu dinamis, tidak monoton, dan lain sebagainya (loris, 2022; Woods, 2017). Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan tersebut adalah kondisi sosial dari komunitas yang menginginkan perubahan, karena konvensionalitas dalam praktik sistem ataupun struktur tertentu. Secara sosio-historis, lahirnya fenomena transformasi sosial tidak bisa dilepaskan dari serangkaian revolusi sosial berbasis kasta di Bali.

Gerakan transformatif pengkastaan yang ada di Bali, dimulai di Singaraja, pada tahun 1925. Redaksi surat kabar Surya Kanta menciptakan transfigurasi topologi sosio-politik, khususnya pengkritisan sistem kasta, praksis sosial, budaya dan agama. Pijar gerakan ini, menciptakan “efek domino”, ditandai dengan munculnya resistensi sosial – tendensi peristiwa sosial tersebut adalah membentuk tatanan egaliterianisme, merekonstruksi tatanan lama, serta melakukan transformasi praksis liturgis agama Hindu. Dalam sudut pandang lain, resistensi Surya Kanta pada sistem kasta bertujuan untuk menghancurkan tatanan dominasi *Tri Wangsa* (Paramita, 2019; Purana, 2018; Purana & Sunariyanti, 2022). Kekuasaan mereka (dalam rentang waktu lama), menciptakan hierarki sosial, serta ketidakseimbangan distribusi keadilan. Disisi lain, inisiasi gerakan sosial dapat dianalisis sebagai suatu tindakan simultan, dalam upaya mengubah “sirkulasi ruang publik dominatif” (Aberson et al., 2000; Stensen, 2022). Upaya mengubah tatanan dalam *public sphere* adalah pengejawantahan dari tindakan yang berorientasi pada logika atau pertimbangan baik-buruk. Pertimbangan ini, berimplikasi dalam sekup makro, yakni berubahnya susunan geo-politik suatu negara, yang awalnya dianggap tidak sesuai menjadi realitas ideal. Gerakan sosial sebagai keniscayaan dalam mendobrak struktur sosial lama, terorganisasi dengan baik karena melibatkan aktor intelektual, sebagai *agen of change* – keberadaannya menjadi esensial karena kemampuan mereka dalam membaca sekaligus mengorganisasi massa di lapangan (Evans, 2023; Poole, 2020).

Meletusnya gerakan sosial di Singaraja tahun 1925 ini melahirkan beragam perspektif serta gagasan teoretis dari ilmu sosial. Heterogenisasi sudut pandang ini, sangat dipengaruhi oleh paham atau struktur keilmuan dari masing-masing pemikir. Akademisi, seperti Auguste Comte dan Emile Durkheim melihat gerakan sosial Surya Kanta, sebagai fenomena gradual atau berlangsung secara perlahan, serta bertahap. Beragam perubahan dipandang sebagai implikasi dalam kerangka yang

tidak radikal sekaligus evolutif. Comte dan Durkheim, memberikan analisa sekaligus menghendaki bahwa, gerakan serta efek sosial dari tindakan tersebut jangan sampai membawa masyarakat dalam situasi fluktuatif, sekaligus memberikan ketidakpastian (Schroder et al., 2016; Stets et al., 2018). Dua pemikir sosiologi ini, melihat gerakan sosial dalam kerangka struktural fungsional, dengan menawarkan cara berpikir untuk mengeleminasi potensi bahaya, ataupun faktor yang bertendensi menciptakan gerakan sosial susulan – cara berpikir ini mengarahkan kita untuk melihat gerakan ataupun perubahan sosial sebagai realitas konvergensi, sekaligus statis. Disisi lain, muncul Karl Marx yang memberikan “wacana tandingan”. Bahwa, perubahan sosial (dalam konteks dekonstruksi kasta di Bali), adalah fenomena dinamis. Masyarakat dipandang sebagai elemen yang terus berubah, tidak ada masyarakat tetap tinggal dalam realitas sama. Bagi Marx, masyarakat dan konflik bersifat inheren, keberadaan individu, kelompok sosial dan sistem sosial dalam radius yang lebih luas, selalu mengalami ketegangan, sekaligus berada dalam arus perubahan – semua itu berlangsung secara revolutif serta terus-menerus (Celikates, 2019; Evans, 2023). Walaupun pandangan serta paparan sosiologis Comte, Durkheim ataupun Marx berbeda dalam melihat masyarakat serta realitas yang menyertainya, kita mendapatkan satu eksplanasi penting bahwa, gerakan sosial dalam prosesnya yang dianggap gradual (evolutif) ataupun berlangsung secara radikal (mengakar; revolutif), tendensi gerakan tersebut tetaplah sama, yakni adanya upaya emansipasi, menegakkan kembali liberalisasi (meletakkan kebebasan individu sebagai prioritas), menghapuskan marginalisasi sosial, serta melakukan disposisi kekuasaan. Adanya sumber daya (manusia, finansial, ataupun tenaga) sekaligus momentum untuk menciptakan perubahan adalah implementasi konstruksi “*meeting arena*” (Grand, 2019; Rosenboim, 2019) – pembentukan “medan perjuangan” sebagai hasil kolaborasi “jejaring sosial”, individu serta institusi dalam diskursus transformasi sosial. Dapat dipaparkan bahwa, gerakan dan transformasi sosial dalam berbagai sudut pandang, memiliki resonansi yang sama, yakni kehendak menciptakan struktur serta sistem sosial baru.

Tulisan ini akan secara khusus membahas munculnya Surya Kanta dalam menciptakan gerakan serta transformasi sosial dalam gerak dekonstruktifnya pada sistem *kinship* dan dominasi kasta – Bali Adnyana (Paramita, 2019; Purana, 2018; Purana & Sunariyanti, 2022). Jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, latar belakang terjadinya gerakan sosial disebabkan oleh beragam faktor. Seperti dalam riset yang dilakukan oleh Anthony Wallace, menjabarkan bahwa ada beragam pemicu terjadinya transformasi sosial diantaranya, kerugian material atau immaterial serta menimbulkan trauma sosial (efek marginalisasi dari kelompok dominan) (O’Mahony, 2023; Sik, 2020). Hal esensial lain yang menyebabkan terjadinya mobilisasi massa dalam transformasi sosial dalam konteks dekonstruksi Surya Kanta adalah tatanan sosial atau sistem sosial mengalami destruksi (Civitarese, 2022; Singh, 2019).

Surya Kanta memegang otoritas untuk memulihkan keteraturan sistem sosial dan mendesak keberadaan otoritas dominan, maka transformasi sosial dari kelompok yang termarginalisasi harus dilakukan, sebagai medium untuk menyadarkan *incumbent*, bahwa ada urgensi tindakan yang harus diambil, khususnya dalam situasi darurat. Sosiologi memandang bahwa, terjadinya gerakan sosial selalu mengusung aspek kohesi sosial dan fokus. Kohesi sosial karena, suatu gerakan diinisiasi oleh banyak orang, serta mobilisasi beragam sumber daya dilakukan secara kolektif dalam ikatan kebersamaan (Boettcher, 2019; Chang & Jetten, 2015). Dilain sisi, gerakan sosial memiliki dimensi fokus. Artinya, transformasi sosial yang dilakukan hanya mengarah pada satu titik, dengan resultante keberhasilan sebuah gerakan. Tanpa fokus, misi ataupun massa dalam sebuah gerakan memiliki probabilitas terdistraksi sekaligus tercerai-berai. Sehingga, harapan sosial untuk melakukan reformasi tidak bisa dicapai. Gerakan dalam sekup *micromobilization* ataupun *macromobilization* berusaha membentuk tatanan sosial konstitutif, merancang desain sosial baru, melibatkan semua subsistem untuk berkontribusi merestorasi konteks sosial (Abazari, 2018; Canivez, 2019).

Riset lain mengenai latar belakang terjadinya transformasi sosial, dilakukan oleh Johnson (Hirvonen & Pennanen, 2019) ia menyatakan bahwa, terjadinya transformasi sosial disebabkan oleh faktor bipolarisasi sosial – konteks ini menjelaskan tentang fenomena bahwa masyarakat terbelah ke dalam dua kubu, yakni kubu ordinat (*Tri Wangsa* – Bali Adnyana) dan sub-ordinat (*Jaba Wangsa* – Surya Kanta). Terciptanya dikotomi tersebut menyebabkan dua kelompok ini mengalami persinggungan dan terus berada dalam situasi antagonistik. Kelompok ordinat ingin melanggengkan posisi serta status *quo*. Disisi lain, kelompok sub-ordinat ingin melakukan agensi serta mendobrak tatanan yang dibangun oleh kelompok ordinat (Jiang et al., 2021; Parsons et al., 2016). Ketegangan dua kelompok ini menjadi salah satu sebab terjadinya transformasi sosial. Oposisi dua kelompok sangat rentan dengan distribusi keadilan yang tidak merata. Seharusnya dalam arena sosial, dua kelompok ataupun lebih memosisikan diri sebagai sub sistem egaliter, dengan ini *social justice* bisa dicapai. Menciptakan disparitas sekaligus fragmentasi identitas, justru menghambat cita-cita sosial – egaliterianisme (Righetti & Visserman, 2018; Sonpar, 2015). Dapat disimpulkan bahwa, segmentasi, diskriminasi, marginalisasi serta opresi adalah bentuk ketidakseimbangan kekuatan antar kelompok sosial. Faktor tersebut juga menjadi faktor fundamental terbelahnya komunitas sosial, membawa mereka ke dalam hierarki. Ketidakpuasan pada stratifikasi yang dominan, menginisiasi mobilisasi massa dan gerakan sosial untuk meruntuhkan tatanan sosial tersebut.

Studi transformasi sosial tidak hanya menganalisa tentang latar belakang terjadinya konteks perubahan, akan tetapi juga memetakan tahapan terjadinya transformasi tersebut. Menurut pemikir Sosiologi Politik bernama Faulks (Poole, 2020), menyatakan ada 5 (lima) tahapan terjadinya gerakan sosial, yakni kebosanan – munculnya aktor intelektual – *framing* isu sosial – mobilisasi sumber daya (manusia, tenaga, finansial, dan sebagainya) – terjadinya gerakan sosial (pengembangan demokrasi). Faulks (Poole, 2020) menyatakan, masyarakat tidak bisa hidup dalam nuansa sosial statis, masyarakat perlu mengekspresikan eksistensi dan fungsi kewargaan mereka dalam merekonstruksi tatanan sosial. Dalam upaya merekonstruksi tatanan sosial yang dipandang tidak lagi ideal, diperlukan aktor intelektual dalam memetakan sekaligus mendesain gerakan relevan dalam upaya menciptakan transformasi sosial. Keberadaan aktor intelektual juga berfungsi untuk menjaga soliditas kelompok ataupun gerakan sosial, karena keberadaan mereka merepresentasikan kekuatan ideologis serta apa yang sedang dicita-citakan.

Kehadiran aktor intelektual juga berfungsi untuk “membangkitkan” tujuan gerakan yang dianggap *urgent*. Urgensi untuk mengubah tipologi sosial membutuhkan analisa komprehensif, agar gerakan sosial berfokus pada tujuan awal, dan tidak menciptakan tindakan irrelevant atau keluar dari konsep gerakan. Selanjutnya, untuk menciptakan aspek praksis sebuah gerakan sosial, dibutuhkan mobilisasi sumber daya – keberadaan sumber daya sangat penting, karena menjadi kekuatan mendasar untuk membongkar sistem lama. Pada akhirnya, beragam sumber daya tersebut akan diarahkan untuk mereformasi realitas sosial serta demokrasi yang berbasiskan pada rakyat (Nathanson, 2009; Speltini & Passini, 2014). Gerakan sosial dan demokrasi merepresentasikan otoritas publik dan institusionalisasi “ide baru”. Dari paparan di atas, tulisan ini akan memberikan fokus pada beberapa dimensi, seperti aspek segregasi sosial, dimensi kemultikulturan dan upaya transformatif yang dilakukan Surya Kanta dalam proses penggugatannya mengenai sistem kasta yang dilegitimasi oleh Bali Adnyana. Maka, untuk memberikan fokus pada aspek-aspek tersebut, riset ini memformulasikan dua rumusan masalah, yakni: a) bagaimana skema segregasi sosial dan konstruksi kemultikulturan dalam kontestasi Surya Kanta versus Bali Adnyana? b) bagaimana skema konstruksi resistensi wacana dominan dan transformasi sosial dari Surya Kanta dalam realitas kasta di Bali? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dimensi segregasi, keberagaman sistem lokal (kemultikulturan berbasis kasta), resistensi dengan kekuatan wacana dan upaya transformatif yang dilakukan oleh Surya Kanta dalam stratifikasi tertutup masyarakat Bali.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan intertekstualitas. Intertekstualitas merupakan selingkung yang bertujuan untuk melakukan kontemplasi fenomena sosial tertentu, melakukan penelusuran diskursus serta berupaya untuk memahami konteks wacana secara holistik. Dalam riset ini, intertekstualitas dioperasionalkan untuk melakukan eksplorasi pada konstruksi pewacanaan dan resistensi kasta yang dilakukan oleh Surya Kanta di Singaraja pada tahun 1925. Referensi yang memberikan penjelasan tentang pertarungan wacana, antara wacana arus utama (Bali Adnyana) dan wacana pinggiran (Surya Kanta), dikumpulkan secara periodik, melalui berbagai *locus*, seperti perpustakaan pribadi, artikel atau penelitian relevan dan beberapa sumber pada *grey area*. Teknik analisis data melalui aplikasi selingkung intertekstualitas dilakukan dengan beberapa tahapan, dan secara aplikatif dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, melakukan pembacaan secara teliti pada berbagai sumber yang menjelaskan tentang keberadaan dua redaksi koran tersebut. Kedua, melakukan telaah tahun resistensi Surya Kanta dan basis gerakan ideologisnya. Ketiga, kemunculan pertarungan wacana dan implikasi sosial dari pewacanaan tersebut. Melalui tahapan teknik analisis data itu, didapatkan berbagai sub bahasan yang substansial dengan rumusan masalah serta tujuan dalam penelitian ini. Terakhir, adanya proses penarikan konklusi, untuk melihat dimensi pewacanaan serta penggugatan dimensi kasta di Bali oleh Surya Kanta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Surya Kanta vs Bali Adnyana: Segregasi Sosial dan Kemultikultur

Kemunculan segregasi dan kemultikultur sebagai suatu upaya untuk menciptakan transformasi sosial, dilatarbelakangi oleh berbagai aspek. Menurut Donatella Della Porta dan Mario Diani (Browne, 2014; Schubert, 2002) transformasi sosial muncul karena adanya segmentasi sosial, yang menciptakan pemilahan dalam masyarakat, berdasarkan kriteria tertentu. Pemilahan ini juga menjadi penyebab terjadinya opresi serta konflik-konflik manifes. Memiliki linearitas dengan pernyataan tersebut, George Rude (Rey et al., 2021) menyatakan, kemunculan dimensi kemultikultur dan transformasi sosial, selain dikarenakan adanya opresi ataupun konflik manifes, juga disebabkan oleh keberadaan kelompok sosial yang frustrasi atau terasing, serta meyakini kondisi akan menjadi lebih baik jika gerakan sosial sudah dilakukan. Transformasi sebagai gerakan sosial sebagai upaya untuk “menggugat” inekualitas sistem sosial, juga disebabkan oleh adanya kehendak dari agen sosial untuk mereformasi atau menata ulang kondisi yang dianggap sudah tidak relevan dengan realitas sosial terkini. Aspek esensial sebagai dasar penting dalam menciptakan kesadaran gerakan sosial adalah pendidikan. Akses terhadap pendidikan menciptakan “ruang baru” untuk merekonstruksi hierarki atau sistem (King et al., 2021). Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kesadaran individu tentang fenomena yang sedang terjadi. Dengan pendidikan, individu akan memiliki horizon atau perspektif tertentu dalam mengkritisi suatu tatanan. Hal ini akan membentuk individu atau kelompok sosial sebagai agen untuk mengguncang stabilitas “hidup mapan”. Lewat pendidikan, proses untuk mengguncang status *quo* tersebut dilakukan dengan menggunakan ketajaman pikiran serta adanya aktor intelektual – memiliki tugas untuk memobilisasi sumber daya dalam mencapai tujuan (King et al., 2021; Neves, 2007). Jadi, munculnya gerakan dan transformasi sosial dalam kehidupan multikultur bersifat multidimensional atau diprakarsai oleh beragam faktor, sebagai reaksi dinamisasi sosial.

Kemunculan kehidupan multikultur dan gerakan transformasi sosial dengan basis kekuatan intelektual tercermin dari gerakan menggugat kekakuan serta eksklusivitas kasta di Bali, yang diprakarsai oleh Surya Kanta. Surya Kanta adalah pers (majalah) yang lahir pada 1 Oktober 1925 di Singaraja, Bali. Kelahiran media cetak ini menjadi momentum perkumpulan masyarakat menengah terdidik (intelektual) – banyak mendapatkan pendidikan Barat. Perspektif tersebut

dipergunakan untuk melihat, mendiskusikan sekaligus mengkritik persoalan agama, kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Bali. Aspek esensial yang ingin ditransformasi dari gerakan intelektual melalui pers Surya Kanta adalah upaya untuk mengubah stratifikasi sosial masyarakat dengan kategorisasi berdasarkan kasta (Paramita, 2019; Purana, 2018; Purana & Sunariyanti, 2022).. Disparitas dan distingsi tersebut menyebabkan kehidupan sosial masyarakat terklasifikasi menjadi dua ranah, yakni ranah superior (diisi oleh *Tri Wangsa* atau tiga kelompok kasta atas, terdiri dari *Brahmana*, *Ksatria* dan *Weisya*) serta ranah inferior (diisi oleh *Jaba Wangsa* atau kelompok masyarakat bawah, diisi oleh *Sudra*). Lahirnya Surya Kanta adalah bentuk antitesa atau “wacana tandingan” untuk menggugat konservatisme Bali Adnyana. Bali Adnyana adalah majalah yang memosisikan diri sebagai agen pemelihara status *quo*, yakni menjaga keteraturan sekaligus keberadaan identitas *Tri Wangsa* (Paramita, 2019; Purana, 2018; Purana & Sunariyanti, 2022). Dengan kata lain, keberadaan Bali Adnyana bertujuan untuk meminimalisir resistensi dan menjaga stabilitas status sosial berbasiskan kekuatan wacana dominan.

Kemunculan Surya Kanta sebagai agen yang menggerakkan terjadinya reformasi sosial, dilatarbelakangi oleh tertutupan serta konservatisme kasta di Bali. Kasta dipersepsikan sebagai dimensi kemultikulturalan berbasis lokalitas, akan tetapi sistem tersebut menghasilkan segregasi sosial. Segregasi sosial secara sosiologis, disebabkan oleh faktor bipolarisasi sosial – konteks ini menjelaskan tentang fenomena bahwa masyarakat terbelah ke dalam dua kubu, yakni kubu ordinat (Bali Adnyana – *Tri Wangsa*) dan sub-ordinat (Surya Kanta – *Jaba Wangsa*). Terciptanya dikotomi tersebut menyebabkan dua kelompok ini mengalami persinggungan dan terus berada dalam situasi antagonistik. Kelompok ordinat ingin melanggengkan posisi serta status *quo* (Bowman, 2014; Trondman et al., 2011). Disisi lain, kelompok sub-ordinat ingin melakukan agensi serta mendobrak tatanan yang dibangun oleh kelompok ordinat. Ketegangan dua kelompok ini menjadi salah satu sebab terjadinya gerakan sosial. Oposisi dua kelompok sangat rentan dengan distribusi keadilan yang tidak merata. Seharusnya dalam arena sosial, dua kelompok ataupun lebih memosisikan diri sebagai sub sistem egaliter, dengan ini *social justice* bisa dicapai. Menciptakan disparitas sekaligus fragmentasi identitas, justru menghambat cita-cita sosial – egaliterianisme (Daly, 2016; Walby, 2012). Dapat disimpulkan bahwa, segmentasi, diskriminasi, marginalisasi serta opresi adalah bentuk ketidakseimbangan kekuatan antar kelompok sosial. Faktor tersebut juga menjadi faktor fundamental terbelahnya komunitas sosial, membawa mereka ke dalam hierarki. Ketidakpuasan pada stratifikasi yang dominan, menginisiasi mobilisasi massa dan gerakan sosial untuk meruntuhkan tatanan sosial tersebut.

Surya Kanta dalam upaya merekonstruksi tatanan sosial yang dipandang tidak lagi ideal, menjadi aktor intelektual dalam memetakan sekaligus mendesain gerakan relevan dalam upaya menciptakan transformasi sosial. Keberadaan Surya Kanta sebagai aktor intelektual juga berfungsi untuk menjaga soliditas kelompok ataupun gerakan sosial, karena keberadaan mereka merepresentasikan kekuatan ideologis serta apa yang sedang dicita-citakan. Kehadiran aktor intelektual juga berfungsi untuk “membangkitkan” tujuan gerakan yang dianggap *urgent* (Kerr et al., 2024; Wieviorka, 2014). Urgensi untuk mengubah tipologi sosial membutuhkan analisa komprehensif, agar gerakan sosial berfokus pada tujuan awal, dan tidak menciptakan tindakan irrelevan atau keluar dari konsep gerakan. Selanjutnya, untuk menciptakan aspek praksis sebuah gerakan sosial, dibutuhkan mobilisasi sumber daya – keberadaan sumber daya sangat penting, karena menjadi kekuatan mendasar untuk membongkar sistem lama. Pada akhirnya, beragam sumber daya tersebut akan diarahkan untuk mereformasi realitas sosial serta demokrasi yang berbasiskan pada rakyat (Lindell, 2022). Gerakan sosial dan demokrasi merepresentasikan otoritas publik dan institusionalisasi “ide baru”. Jadi, gerakan sosial memerlukan tahapan sistemik yang holistik.

b. Surya Kanta vs Bali Adnyana: Resistensi Wacana Dominan dan Transformasi Sosial Masyarakat Kasta di Bali

Proses resistensi wacana dominan dan transformasi sosial Surya Kanta berlangsung dengan menggunakan kekuatan wacana ilmu pengetahuan. Hal ini bisa dilihat dari produktivitas tulisan yang diterbitkan. Menurut Triguna (Paramita, 2019; Purana, 2018; Purana & Sunariyanti, 2022), mencatat ada sejumlah tulisan yang diterbitkan selama bulan Oktober 1925 sampai September 1927. Publikasi tersebut berjumlah 266 artikel, terdiri dari: 9 artikel dengan tema usaha pelestarian adat, 25 artikel dengan tema perbedaan perlakuan sosial, 80 artikel dengan tema pendidikan dan pengajaran, 4 artikel dengan tema pemerintahan, 60 artikel dengan tema isu konflik kasta, 13 artikel dengan tema hukum, 17 artikel dengan tema perubahan adat dan agama, 6 publikasi iklan, 18 kabar redaksi dan lain-lain sebanyak 34. Dari sekian banyak publikasi yang dilakukan sebagai proses dalam membangun ide konstruktif, keberadaan Surya Kanta selain mengkritisi segregasi sosial (berdasarkan genealogis – kasta), secara esensial juga memiliki tujuan untuk menggugat hegemoni masyarakat *Tri Wangsa* yang dilegitimasi melalui upacara *ngaben* (upacara pembakaran jenazah dalam tradisi Hindu di Bali) (Paramita, 2019; Purana, 2018; Purana & Sunariyanti, 2022). Masyarakat berkasta yang melakukan upacara tersebut, mengekstrapolasi ritus dengan membuat upacara yang megah, serta melibatkan beragam sumber daya (finansial, sosial dan waktu). *Ngaben* sebagai suatu liturgi dijadikan sebagai cara untuk menegaskan eksistensi serta posisi sosial kelompok *Brahmana*, *Ksatria* dan *Weisya* sebagai *incumbent* dengan modal sosial, modal ekonomi dan modal budaya yang besar (Paramita, 2019; Purana, 2018; Purana & Sunariyanti, 2022). Besarnya akumulasi modal akumulatif dan otoritatif tersebut menciptakan citra “darah biru” dari ketiga kelompok sosial itu, sekaligus menciptakan distingsi bahwa, hanya masyarakat kasta atas yang bisa mengakses upacara *ngaben*, masyarakat kelas bawah tidak mampu menjangkau upacara tersebut, karena adanya anggapan kepemilikan sumber daya atau modal yang minim.

Kritik Surya Kanta melalui tulisannya, memberikan eksplanasi bahwa, status sosial individu ataupun kelompok tertentu tidak ditunjukkan dari liturgi ataupun genealogi, akan tetapi dari penguasaan ilmu pengetahuan. Dalam gerakan wacana Surya Kanta, akal budi menjadi aspek mendasar untuk membedakan prestise sosial tiap individu dalam kehidupan di masyarakat. Konteks ilmu pengetahuan menjadi aspek penting, karena membantu individu dalam menciptakan kerangka berpikir, mensistematisasi, menciptakan sintesa serta mengevaluasi suatu fenomena (Munck, 2008; Schinkel, 2013). Dengan ini, tiap individu tidak akan terjebak pada arus konservatif yang mencegah pikiran berkembang. Ilmu pengetahuan menciptakan makhluk sosial yang berpikir holistik, interseksionalitas dan mampu membangun ekuivalensi dalam kehidupannya. Jadi, penguatan wacana ideologis dan prioritas ilmu pengetahuan dalam sebuah gerakan sosial, menjadi piranti untuk mengikis nilai-nilai konservatif dalam tatanan sosial.

Jika dianalisis, penguatan wacana ideologis menggunakan kanal media cetak Surya Kanta termasuk ke dalam transformasi sosial. Gerakan sosial dengan tipe reformatif (transformatif) berusaha untuk melakukan perubahan pada tatanan kultural, pola tingkah laku atau suatu aturan sosial, akan tetapi tidak mengubah tatanan institusinya. Ide dasar yang diusung dalam gerakan wacana Surya Kanta berusaha untuk mengkritik dua aspek, yakni aspek liturgi pada institusi agama, serta legitimasi status sosial dengan menggunakan pengaruh institusi *kinship* (berdasarkan genealogis atau kasta). Pelaksanaan upacara *ngaben* (pembakaran jenazah), yang dilakukan masyarakat *Tri Wangsa* dinilai berlebihan (Paramita, 2019; Purana, 2018; Purana & Sunariyanti, 2022). Hal ini didasarkan pada realitas upacara, khususnya penggunaan perangkat atau simbol yang dinilai keluar dari esensinya. Seperti penggunaan *bade* (alat pengusung jenazah), dibuat tinggi dan sangat besar. Semakin tinggi dan besar sebuah *bade*, menunjukkan posisi sosial individu di masyarakat. Upacara *ngaben* dipergunakan oleh golongan *Tri Wangsa* pada saat itu untuk mempertegas kedudukan mereka (Paramita, 2019; Purana, 2018; Purana & Sunariyanti, 2022).

Kritik Surya Kanta dalam realitas berpacara agama, menjadi benih penyederhanaan pelaksanaan *ngaben* dikemudian hari. Upacara yang awalnya sangat konvensional dan rumit, bertransfigurasi ke dalam pelaksanaan yang lebih sederhana. Gerakan ideologis ini menghasilkan kesadaran, bahwa, elemen penting sebuah upacara adalah esensi bukan pada seremoninya. Benih dan pemikiran Surya Kanta berlangsung secara gradual, yang membawa masyarakat Bali (khususnya beragama Hindu) sampai pada suatu kesadaran reformatif (Kamoche et al., 2014; Taylor, 2009). Hal ini terlihat dari penyederhanaan tata cara pembakaran jenazah menggunakan krematorium, yang dilakukan tidak hanya golongan *Jaba Wangsa*, akan tetapi juga dilakukan oleh golongan *Tri Wangsa*. Walaupun krematorium baru digunakan pada beberapa dekade terakhir, analisa para akademisi menyatakan bahwa, secara historis ide dasarnya sudah dimulai dari gerakan dan pemikiran Surya Kanta. Walaupun terjadi penyederhanaan, keberadaan Hindu sebagai institusi agama tetap eksis. Begitu juga dengan kasta sebagai institusi *kinship*, meskipun keberadaannya masih ada, tetapi tidak lagi menjadi indikator dalam menciptakan pelapisan atau menjadi standar prestise sosial. Namun, status sosial individu dalam masyarakat lebih ditentukan oleh tingkat pendidikannya.

Surya Kanta yang secara konsisten mempublikasikan kekuatan wacananya, mengusung ide dasar yang disebut manusa pada atau ekualitas kedudukan antar manusia, bahwa kehormatan seorang individu tidak dilihat dari status kelahiran, akan tetapi dari usaha dan motif berprestasinya. Gerakan sosial berbasis wacana atau ideologi dari Surya Kanta menunjukkan keberhasilan, karena suatu gerakan tidak hanya mengubah konteks sosial, akan tetapi menata ulang elemen psikologis individu (Heath, 2023; Santos, 2002). Mentransformasi nilai sebagai elemen psikologis atau tatanan sosial membutuhkan konsistensi pemikiran reformatif dari kelompok pembelajar. Kehadiran pembelajar berfungsi mempertanyakan ambiguitas konsep keyakinan suatu masyarakat, sekaligus memformulasikan tatanan reformatif mengenai ide simbolik-kebudayaan dalam dimensi tindakan kolektif. Mekanisme gerakan yang dilakukan oleh Surya Kanta menggunakan pendekatan non-kekerasan (fisik) (Lignier, 2021; Rothe & Collins, 2018). Proses gerakan dilakukan dengan “pertarungan” ide serta gagasan, yang berusaha memberikan kritik pada sistem sosial. Sistem sosial pada saat itu dinilai konservatif dan bercorak feodalistik, karena terciptanya segementasi berbasiskan status kelahiran. Surya Kanta berhasil menciptakan wacana tandingan dan tindakan formatif dalam menggugat rigiditas sistem sosial tersebut.

KESIMPULAN

Surat kabar Surya Kanta yang hadir sebagai penanda ketidakpuasan masyarakat Bali (khususnya yang beragama Hindu) pada sistem pengkastaan, menandai lahirnya era gerakan sosial baru. Dikatakan demikian karena, gerakan sosial tidak hanya berhenti dan diasosiasikan sebagai tindakan simultan sekelompok orang, melakukan aktivitas fisik seperti bentrokan ataupun orasi di depan umum. Namun, gerakan sosial baru, yang salah satunya direpresentasikan melalui publikasi kritis Surya Kanta, membawa kita pada dimensi bahwa, gerakan sosial sudah mengalami transisi, tidak lagi pada ranah benturan fisik, akan tetapi secara tendensius mengarah pada benturan argumentasi ataupun kekuatan nalar. Argumentasi dan kekuatan nalar dalam meruntuhkan dominasi memiliki radius yang sangat luas, serta mampu memberikan penyadaran pada kelompok sosial tertentu, bahwa selama ini mereka hidup dalam sistem sosial hegemonik, mengurung mereka dalam sistem stratifikatif, serta mengopresi mereka secara simbolik. Surya Kanta hadir sekaligus menjadi elemen penting dalam pembacaan sosiologi pada tipologi gerakan sosial baru. Ternyata, dimensi transformatif dalam suatu aksi akan lebih efektif jika para agen melakukan agensi melalui penulisan ide, dalam upaya menciptakan transformasi sosial – sebagai hasil penggugatan terhadap rigiditas tatanan lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abazari, A. (2018). Opposition Instead of Recognition: The Social Significance of “Determinations of Reflection” in Hegel’s Science of Logic. *Philosophy and Social Criticism*, 44(3), 253–277. <https://doi.org/10.1177/0191453717723957>
- Aberson, C. L., Healy, M., & Romero, V. (2000). Ingroup Bias and Self-Esteem: A Meta-Analysis. *Personality and Social Psychology Review*, 4(2), 157–173. https://doi.org/10.1207/S15327957PSPR0402_04
- Boettcher, J. W. (2019). Diversity, Toleration and Recent Social Contract Theory. *Philosophy and Social Criticism*, 45(5), 539–554. <https://doi.org/10.1177/0191453718820907>
- Bowman, G. (2014). Violence Before Identity: An Analysis of Identity Politics. *The Sociological Review*, 62(2), 152–165. <https://doi.org/10.1111/1467-954X.12195>
- Browne, C. (2014). The Institution of Critique and The Critique of Institutions. *Thesis Eleven*, 124(1), 20–52. <https://doi.org/10.1177/0725513614549433>
- Canivez, P. (2019). The Dialectic of Recognition: A Post-Hegelian Approach. *European Journal of Social Theory*, 22(1), 63–79. <https://doi.org/10.1177/1368431018787412>
- Celikates, R. (2019). Book Review: Critique as Social Practice (Critical Theory and Social Self-Understanding). *European Journal of Social Theory*, 22(1), 123–126. <https://doi.org/10.1177/1368431018814347>
- Chang, M. X. L., & Jetten, J. (2015). Understanding Cultural Identification: Integrating The Intersubjective Approach With Social Identity Theorizing. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 46(10), 1291–1295. <https://doi.org/10.1177/0022022115604394>
- Civitarese, G. (2022). Intersubjectivity and Analytic Field Theory. *Journal of The American Psychoanalytic Association*, 69(5), 853–893.
- Daly, E. (2016). Ritual and Symbolic Power in Rousseau’s Constitutional Thought. *Law, Culture and The Humanities*, 12(3), 620–646. <https://doi.org/10.1177/1743872113504371>
- Evans, J. (2023). On The Very Idea of Normative Foundations in Critical Social Theory. *Philosophy and Social Criticism*, 49(4), 385–408. <https://doi.org/10.1177/01914537211059512>
- Grand, E. le. (2019). Conceptualising Social Types and Figures: From Social Forms to Classificatory Struggles. *Cultural Sociology*, 13(4), 411–427. <https://doi.org/10.1177/1749975519859962>
- Heath, J. (2023). The Violence Inherent in The System. *Philosophy and Social Criticism*, 49(8), 883–902. <https://doi.org/10.1177/01914537231186130>
- Hirvonen, O., & Pennanen, J. (2019). Populism as a Pathological Form of Politics of Recognition. *European Journal of Social Theory*, 22(1), 27–44. <https://doi.org/10.1177/1368431018766271>
- Ioris, A. A. R. (2022). World Out of Difference: Relations and Consequences. *Philosophy and Social Criticism*, 1–24. <https://doi.org/10.1177/01914537221101316>
- Jiang, T., Chen, Z., Wang, S., & Hou, Y. (2021). Ostracism Disrupts Self-Continuity. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 47(9), 1390–1400. <https://doi.org/10.1177/0146167220974496>
- Kamoche, K., Kannan, S., & Siebers, L. Q. (2014). Knowledge-Sharing, Control, Compliance and Symbolic Violence. *Organization Studies*, 35(7), 989–1012. <https://doi.org/10.1177/0170840614525325>
- Kerr, R., Robinson, S., & Sliwa, M. (2024). Organising Populism: From Symbolic Power to Symbolic Violence. *Human Relations*, 77(1), 81–110. <https://doi.org/10.1177/00187267221129181>
- King, H., Crossley, S., & Smith, R. (2021). Responsibility, Resilience and Symbolic Power. *The Sociological Review*, 69(5), 920–936. <https://doi.org/10.1177/0038026120986108>
- Lignier, W. (2021). Symbolic Power for Beginners: The Very First Social Efforts to Control Others Actions and Perceptions. *Sociological Theory*, 39(4), 201–224. <https://doi.org/10.1177/07352751211050660>
- Lindell, J. (2022). Symbolic Violence and The Social Space: Self-Imposing The Mark of Disgrace? *Cultural Sociology*, 16(3), 379–401. <https://doi.org/10.1177/17499755221082375>
- Munck, R. (2008). Introduction: Deconstructing Violence, Power, Force and Social Transformation. *Latin American Perspectives*, 35(5), 3–19. <https://doi.org/10.1177/0094582X08321952>
- Nathanson, C. A. (2009). Problems, Crises, Events and Social Change: Theory and Illustrations. *Sociological Research Online*, 14(5), 1–10. <https://doi.org/10.5153/sro.1974>
- Neves, M. (2007). The Symbolic Force of Human Rights. *Philosophy & Social Criticism*, 33(4), 411–

444. <https://doi.org/10.1177/0191453707077014>
- O'Mahony, P. (2023). Critical Theory, Peirce and The Theory of Society. *European Journal of Social Theory*, 26(2), 258–281. <https://doi.org/10.1177/13684310221120006>
- Paramita, I. G. A. (2019). Berawal dari Surya Kanta vs Bali Adnyana. *Politik Media Dan Wacana Kebudayaan*, 37–45.
- Parsons, C. A., Jacobson, J. A., & Krupp, D. B. (2016). Self-Resemblance and Social Rejection. *Evolutionary Psychology*, 1–8. <https://doi.org/10.1177/1474704916685324>
- Poole, A. (2020). Re-theorising The Funds of Identity Concept From The Perspective of Subjectivity. *Culture and Psychology*, 26(3), 401–416. <https://doi.org/10.1177/1354067X19839070>
- Purana, I. M. (2018). Polemik Adat dalam Bali Adnyana dan Surya Kanta: Perspektif Kajian Budaya. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*, 9(3), 1–15. <https://doi.org/10.46650/wa.9.1.608.%25p>
- Purana, I. M., & Sunariyanti, I. A. P. S. M. (2022). Polemik Ideologi dalam Bali Adnyana dan Surya Kanta: Perspektif Kajian Budaya. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 4782–4791. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7389>
- Rey, J., Bolay, M., & Gez, Y. N. (2021). Cosmopolitan Enclaves: An Introduction. *Critique of Anthropology*, 41(4), 331–344. <https://doi.org/10.1177/0308275X211059659>
- Righetti, F., & Visserman, M. (2018). I Gave Too Much: Low Self-Esteem and The Regret of Sacrifices. *Social Psychological and Personality Science*, 9(4), 453–460. <https://doi.org/10.1177/1948550617707019>
- Rosenboim, O. (2019). State, Power and Global Order. *International Relations*, 33(2), 229–245. <https://doi.org/10.1177/0047117819840803>
- Rothe, D. L., & Collins, V. E. (2018). Consent and Consumption of Spectacle Power and Violence. *Critical Sociology*, 44(1), 15–28. <https://doi.org/10.1177/0896920515621119>
- Santos, J. V. T. Dos. (2002). The Worldization of Violence and Injustice. *Current Sociology*, 50(1), 123–134. <https://doi.org/10.1177/0011392102050001009>
- Schinkel, W. (2013). Regimes of Violence and The Trias Violentiae. *European Journal of Social Theory*, 16(3), 310–325. <https://doi.org/10.1177/1368431013476537>
- Schroder, T., Hoey, J., & Rogers, K. B. (2016). Modeling Dynamic Identities and Uncertainty in Social Interactions: Bayesian Affect Control Theory. *American Sociological Review*, 81(4), 828–855. <https://doi.org/10.1177/0003122416650963>
- Schubert, J. D. (2002). Defending Multiculturalism (From Hegemony to Symbolic Violence). *American Behavioral Scientist*, 45(7), 1088–1102. <https://doi.org/10.1177/0002764202045007004>
- Sik, D. (2020). Towards a Social Theory of Fear: A Phenomenology of Negative Integration. *European Journal of Social Theory*, 23(4), 512–531. <https://doi.org/10.1177/1368431019850074>
- Singh, S. (2019). How Should We Study Relational Structure? Critically Comparing The Epistemological Positions of Social Network Analysis and Field Theory. *Sociology*, 53(4), 762–778. <https://doi.org/10.1177/0038038518821307>
- Sonpar, S. (2015). Including, Excluding...Annihilating. *Psychology and Developing Societies*, 27(2), 174–188. <https://doi.org/10.1177/0971333615592996>
- Speltini, G., & Passini, S. (2014). Cleanliness/Dirtiness, Purity/Impurity as Social and Psychological Issues. *Culture and Psychology*, 20(2), 203–219. <https://doi.org/10.1177/1354067X14526895>
- Stensen, V. (2022). Envy, Self-Esteem and Distributive Justice. *European Journal of Political Theory*, 1–20. <https://doi.org/10.1177/14748851221125572>
- Stets, J. E., Burke, P. J., & Savage, S. V. (2018). Exchange, Identity Verification, and Social Bonds. *Social Psychology Quarterly*, 81(3), 207–227. <https://doi.org/10.1177/0190272518785866>
- Taylor, P. (2009). Book Review: Violence (Slavoj Zizek). *The Sociological Review*, 57(1), 210–212. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2008.01811_5.x
- Trondman, M., Lund, A., & Lund, S. (2011). Socio-Symbolic Homologies: Exploring Paul Willis' Theory of Cultural Forms. *European Journal of Cultural Studies*, 14(5), 573–592. <https://doi.org/10.1177/1367549411412205>
- Walby, S. (2012). Violence and Society: Introduction to an Emerging Field of Sociology. *Current*

- Sociology*, 61(2), 95–111. <https://doi.org/10.1177/0011392112456478>
- Wieviorka, M. (2014). The Sociological Analysis of Violence: New Perspectives. *The Sociological Review*, 62(2), 50–64. <https://doi.org/10.1111/1467-954X.12191>
- Woods, P. (2017). Nomadic Missiology? Bringing Braidotti's Thought Into The Conversation About The Future of Cross-Cultural Mission. *Transformation*, 34(4), 301–310. <https://doi.org/10.1177/0265378817725467>